

## MODJOKOETHO REVISITED: MELIHAT KEMBALI PANDANGAN GEERTZ TENTANG *SANTRI*

**Asep Sa'duddin Sabilurrasad**

*Mahasiswa Program Magister Antropologi,  
FISIP Universitas Indonesia.  
Peneliti Lakpesdam PBNU*



Indonesia, negara yang baru merdeka pada tahun 1945 ini memiliki peran yang khusus dan penting. Menjadi khusus karena - meskipun Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia - ia bukan negara Islam. Menjadi penting karena, - meskipun ia bukan negara Islam, - ia memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Kualitas-kualitas penting dan khusus ini merupakan titik berangkat dari tulisan ini. Meskipun tentu saja, argumen-argumen yang akan dikemukakan di dalam tulisan ini tidak bermaksud melakukan simplifikasi atau berniat menyederhanakan masalah.

Membaca Islam dan politik di Indonesia tidak bisa kita lepaskan dari konteks sejarah, jaringan epistemik, serta tradisi keilmuan yang mewarnai,-tidak

hanya sejarah Islam di Indonesia, tetapi juga,- sejarah kebangkitan nasional. Asumsi ini setidaknya bisa kita lacak dari kebijakan politik etis Belanda yang memiliki tiga pilar utama, di antaranya; irigasi, transmigrasi, dan pendidikan untuk penduduk pribumi/bumi putera.

Dari ketiga kebijakan politik etis pemerintah kolonial Hindia Belanda ini, mari kita fokuskan perhatian kita pada bagian yang ketiga; Pendidikan untuk bumi putera. Implikasi dari kebijakan yang ketiga ini adalah bermunculannya kelompok bumi putera terdidik yang berasal dari kalangan priyayi atau bangsawan. Dari kelompok inilah kesadaran nasionalisme tumbuh di hampir seluruh wilayah di Hindia Belanda. Salah satu tokoh yang paling penting adalah Hadji Oemar Said

Tjokroaminoto, perintis dan pendiri gerakan nasionalis berbasis agama di Hindia Belanda; Sarekat Islam. Salah satu capaian penting dari gerakan nasionalis ini adalah lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Dari Sumpah Pemuda inilah semangat nasionalisme, perlahan tapi pasti, menjadi nafas perjuangan seluruh elemen pemuda di seantero bumi Nusantara. Lalu, siapakah sebenarnya HOS Tjokroaminoto ini. Beliau adalah santri dan beliau adalah cucu salah satu ulama penting di tanah Jawa. Hingga kini pusaranya tidak pernah sepi dari peziarah, HOS Tjokroaminoto adalah keturunan dari Kyai Hasan Besari Ponorogo, Jawa Timur.

### **Kemunculan Politik Aliran**

Bangkitnya kesadaran nasional sebagaimana telah disinggung diatas bukanlah kejadian yang muncul tiba-tiba. Ada proses panjang yang berlangsung di dalamnya, salah satunya adalah pendidikan untuk bumi putera. Perlu diperhatikan, pendidikan untuk bumi putera bukan merupakan satu-satunya kegiatan belajar-mengajar di Hindia Belanda pada waktu itu. Jauh sebelum sekolah-sekolah pemerintah kolonial yang diperuntukkan bagi priyayi-priyayi bumi putera ini berdiri, kaum bumi putera telah menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar sendiri. Tempat belajar ini disebut dengan Pesantren. Para pelajarnya disebut dengan kaum Santri.<sup>1</sup>

Implikasi dari kedua jenis pendidikan ini kemudian melahirkan dua kelompok penting yang kemudian mewarnai berdirinya republik; santri dan priyayi. Namun, ada kelompok lain yang tidak termasuk keduanya, ia tidak bersekolah di sekolah kolonial, pun tidak di pesantren, kelompok ini kemudian disebut dengan Kaum Abangan. Kategorisasi ini bukan berarti tidak menyimpan masalah. Garis batas antar ketiganya kadang tidak tegas, kadang buram, kadang beririsan. Namun, kategorisasi ini untuk mempermudah pembacaan kita memang amat sangat membantu. Setidaknya, kategorisasi ini telah digunakan oleh salah satu raksasa antropologi dunia; Clifford Geertz.<sup>2</sup>

Meski demikian, kategorisasi yang dibuat oleh Geertz bukanlah kategorisasi yang sama sekali baru. Jauh sebelum itu, berangkat dari fakta sosial yang didasarkan pada komunitas epistemik dan jaringan pengetahuan tersebut, Bung Karno telah lebih dulu membuat kategorisasi kelompok sosial melalui pembagian tiga ideologi besar yang melandasi perjuangan kemerdekaan di Hindia Belanda, yakni; Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme.<sup>3</sup> Setelah revolusi agustus 1945, trilogi tersebut oleh Bung Karno diperkenalkan dengan Istilah baru, yakni; NASAKOM (Nasionalis-Agama-Komunis).

---

Jakarta: LP3ES, 2011

2 Clifford Geertz, *The Religion of Java*, Illinois: Massachusetts Institute of Technology, 1960.

3 Ir. Soekarno, *Di bawah Bendera Revolusi*, Jakarta: Panitya Penerbit DBR, 2016.

---

1 Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*,

Tumbuhnya tiga ideologi besar ini,- sekali lagi,- tidak bisa dilepaskan dari konteks jaringan komunitas epistemik dan keilmuan yang berkembang sebelumnya. Perlu diakui, tiga tipologi kelas sosial ini, pun digunakan Soeharto dan orde baru untuk mengontrol dan mengendalikan kekuasaannya. Asumsi ini bukan omong kosong belaka, kita bisa melihat jejaknya pada fusi tiga partai pada awal 70 an. Bagi kelompok santri, orde baru mengkanalisasi gerakan politiknya pada PPP atau Partai Persatuan Pembangunan. Untuk kelompok priyayi, kanalisasi kekuatan politiknya mencoba dikontrol orde baru melalui Golkar atau Golongan Karya. Sedangkan untuk kelompok abangan, orde baru mengkanalisasi politiknya melalui PDI atau Partai Demokrasi Indonesia. Memang asumsi ini cenderung *simplistic*. Namun, pembacaan sederhana tadi setidaknya memberikan gambaran bahwa komunitas epistemik yang di bangun oleh geneologi pengetahuan yang berkembang di nusantara memiliki pengaruh yang tidak bisa dibilang sepele.

## **Setelah 20 Tahun Reformasi**

Setelah tahun 1998, tepatnya setelah rezim Orde Baru tumbang, polarisasi telah mengalami banyak sekali perubahan. Hal ini tentu saja bukan hanya kita lihat pada banyaknya partai politik peserta pemilu pada tahun 1999. Lebih dari itu, perpecahan tiga partai politik utama di era Orde Baru juga merupakan salah satu variabel yang

penting untuk diukur dan diperhatikan.

Pada Pemilu 1999, PDI-Perjuangan pimpinan Megawati Soekarnoputri keluar sebagai juara. Pada pemilu 2004, Golkar,- sejak pemilu 1999 berubah menjadi Partai Golkar,- keluar sebagai juara. Sedangkan pada 2009, Partai baru bentukan SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono keluar sebagai juara. Terakhir, pemilu 2014, PDI-Perjuangan kembali keluar sebagai juara setelah 15 tahun hanya cukup puas di posisi dua dan tiga. Lalu, apa yang menarik diperhatikan dari empat pemilu pasca reformasi ini, mari kita bahas satu persatu secara lebih hati-hati.

Kelompok santri yang pada mulanya terkonsolidasi,-atau dipaksa dihimpun,- dalam PPP, mengalami polarisasi dan perpecahan sejak 1999. Hal ini bisa kita lihat dari lahirnya partai-partai yang berafiliasi dan berpatronase pada organisasi kemasyarakatan berbasis Islam seperti PAN/Partai Amanat Nasional yang berpatron pada Pengurus Pusat Muhammadiyah atau PKB/Partai Kebangkitan Bangsa yang berpatron pada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pada pemilu berikutnya, kedua partai menengah ini juga mengalami polarisasi yang tidak kalah pelik dan berdramadrama. Konflik di PAN melahirkan PMB/Partai Matahari Bangsa, sedangkan konflik di PKB melahirkan PKNU/Partai Kebangkitan Nahdlatul Ummat, PKU/Partai Kebangkitan Ummat dan PNU/Partai Nahdlatul Ummat. Selain itu, konflik di internal PPP sendiri tidak kalah sengit. Konflik

di internal PPP melahirkan PBR/ Partai Bintang Reformasi. Kontestasi antara kelompok Islam modernis dan kelompok Islam tradisional juga mewarnai konflik di dalam partai yang sejak pemilu 1999 mengganti lambang dari bintang menjadi ka'bah. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, partai-partai yang lahir dari konflik-konflik pasca muktamar tersebut tidak berumur panjang, - mereka layu sebelum berkembang.

Selain partai-partai yang memiliki patronase terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam terkuat dan terbesar di Indonesia; NU dan Muhammadiyah. Ada juga partai-partai Islam yang berafiliasi terhadap residu-residu dari Masyumi/Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Hal ini tercermin pada PBB/Partai Bulan Bintang, PSII, Masyumi dan sebagainya. Di luar itu, ada juga partai Islam yang benar-benar "baru" dan terlepas dari konteks sejarah pergolakan republik di era awal kemerdekaan. Partai ini justru berafiliasi dengan gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Partai ini pada mulanya menamakan diri Partai Keadilan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, partai ini mengubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera sejak pemilu 2004.

Lalu, dari sekian dinamika partai politik beraliran Islam yang dijelaskan tadi, apakah teori politik aliran yang dikemukakan Geertz masih cukup relevan. Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Menjadi iya karena; struktur politik

Indonesia tidak banyak berubah. Struktur politik Indonesia masih dikendalikan dan didominasi oleh oligarki-oligarki yang berasal dari kelompok priyayi, sebagaimana yang terjadi pada tahun 50 an. Menjadi tidak karena; sejak reformasi 1998 demokrasi di Indonesia mengalami transisi dan perubahan. Terutama sejak era demokrasi liberal. Indonesia telah berhasil melakukan pemilihan presiden secara langsung, otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Fenomena ini tentu menjadi situasi yang benar-benar berbeda. Jika kelompok santri yang tadinya berhimpun di PPP kemudian terpecah ke dalam banyak sekali varian politik kepartaian, maka pada kelompok nasionalis juga mengalami kondisi yang kurang lebih sama; kelompok ini terpecah ke dalam banyak sekali partai politik. Beralih ke kelompok komunis, secara organisasi kelompok ini sudah dibubarkan sejak tragedi Gestok 1965. Sejak itu, kelompok ini dipukul habis dan sama-sekali tidak memiliki peluang untuk kembali bangkit. Bahkan setelah rezim orde baru tumbang dan gelombang reformasi 1998,- gerakan komunis tidak pernah benar-benar mendapatkan tempat untuk berkembang dan bangkit.

Selain itu, transformasi demokrasi di Indonesia tadi juga telah membuat preferensi politik konstituen di Indonesia menjadi makin berubah dan beragam. Jika sebelum orde baru politik aliran dan ideologi merupakan preferensi politik yang paling kuat, termasuk di dalamnya adalah politik identitas. Maka

pada era setelah orde baru tumbang,- terutama setelah era pemilihan langsung,- preferensi politik konstituen di Indonesia cenderung mengarah pada kelompok *rational choice* atau pemilih rasional. Meskipun demikian, partai-partai yang menjual dan selalu merepetisi isu politik identitas juga tidak benar-benar ditinggalkan. Tulisan ini berusaha memaparkan perubahan apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, tulisan ini akan mencoba melacaknya melalui geneologi keilmuan pada tahun 50 an di tempat Geertz melakukan penelitian; Modjokoetho.

### **Beberapa Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai geneologi pengetahuan di Modjokoetho pada tahun 50 an. Hal ini terkait dengan tidak memadainya penjelasan Clifford Geertz dalam bukunya *Religion of Java*. Meski apa yang dijelaskan oleh Geertz tidak sepenuhnya keliru, namun ada beberapa kesalahan yang menurut penulis merupakan kesalahan mendasar dan penting untuk diteliti lebih jauh lagi. Jika kita membuka-buka kembali beberapa kritik sebelumnya yang dilancarkan kepada Geertz mengenai triloginya yang membagi agama masyarakat jawa ke dalam tiga kategori,yakni: *Priyayi*, *Abangan* dan *Santri*. Maka kita bisa sebutkan beberapa dari sekian banyak kritik para pendahulu tersebut,

diantaranya;

*Pertama*, kritik Harsja W. Bachtiar yang menyebutkan bahwa abangan dan santri merupakan kategori religius, sedangkan priyayi merupakan kategori kelas. *Kedua*, kritik pak Parsudi Suparlan yang menyebutkan bahwa *abangan* adalah istilah denotatif (bukan untuk mengidentifikasi diri sendiri), ada cakupan makna merendahkan derajat (derogatif). *Ketiga*, masih berasal dari pak Parsudi Suparlan, Islam bukanlah bagian dari agama Jawa. Di saat yang sama, agama jawa bukan juga agama pemujaan kepada leluhur. Agama Jawa juga merupakan agama yg memiliki titik tekan pada keseimbangan antara manusia dan alam/kosmos (*Sangkan Paraning Dumadi*). Lalu *keempat*, trilogi abangan, santri dan priyayi bukanlah sesuatu yang baru. Ia adalah manifestasi dari visi politik Soekarno yang dipegang teguh sepanjang hidupnya yakni tentang nasionalisme, Islam dan marxisme yang kemudian menjadi nasionalis (priyayi), agama (santri) dan komunis (abangan).

Meskipun penulis tidak akan mengajukan kritik yang sama dengan para pendahulu tadi, bukan berarti penulis mengabaikan kritik-kritik tersebut sama sekali. Beberapa hal yang menurut penulis “mengganggu” dari temuan Geertz tersebut, di antaranya adalah:

“Bangkitnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia pada awal abad ini sebagai bagian dari gerakan nasionalis secara umum, yang pada 1945 akhirnya membuat Indonesia merdeka dari

kekuasaan Belanda, mehidupkan kembali dan semakin mempertajam semangat untuk Islam yang lebih murni, yang tidak begitu terkontaminasi oleh animism atau mistisisme, di antara elemen pedagang kecil dalam masyarakat Jawa. Islam yang lebih murni itu merupakan subtradisi yang saya sebut Santri.”<sup>4</sup>

Kesimpulan Geertz dalam mendefinisikan kelompok santri terkesan bahwa kelompok santri merupakan kelompok yang eksklusif, puritan dan konservatif. Kesimpulan semacam ini saya kira terlalu terburu-buru dan simplistis. Jika dikaji lebih jauh lagi, kelompok santri tidak sekolot yang dideskripsikan Geertz. Selain itu, dalam menjelaskan pola ritual santri, Geertz hanya membahas Sembahyang, Shalat Jum'at dan Puasa Ramadhan. Penjelasan ritual ini sama sekali tidak memadai. Mestinya Geertz bisa menggali lebih dalam dari hal yang paling mendasar; rukun Islam. Di mana di dalamnya tercakup Syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji.

### **Minus Teori Konflik dan Epistemologi Islam**

Teori konflik ini merupakan teori yang diperkenalkan pertama kali oleh salah satu filsuf Jerman paling berpengaruh

di dunia; Karl Marx. Menurutny, kesadaran kelas menjadi salah satu faktor penting dalam melihat konflik yang terjadi di masyarakat. Anehnya, Clifford Geertz sendiri menghindari diksi kelas dan marxisme sama sekali. Namun, bukan berarti teori ini menjadi tidak sah jika digunakan dalam melakukan analisis kelas bagi tiga kategori yang sudah dirumuskan oleh Geertz tadi; santri, priyayi dan abangan.

Selain itu, salah satu aspek penting dari teori konflik ini adalah persoalan dialektika dari tesis, anti-tesis dan sintesis yang mana teori ini menjadi penting dan relevan ketika dilakukan dalam menganalisa sebuah super struktur dan pembagian kelas dalam sebuah masyarakat.

Sedangkan di sisi lain, di dunia Islam, epistemologi atau sumber pengetahuan bukan hanya berasal dari dua sumber penting; rasionalitas dan empirisme seperti halnya yang digunakan di dunia barat sejak abad pencerahan yang dimulai oleh Rene Descartes yang memiliki salah satu adagium paling terkenal di dunia; *cogito ergo sum* yang artinya saya berpikir, maka saya ada. Namun, dalam dunia islam, epistemologi tidak hanya terbatas pada dua cara saja seperti empirisme (*bayani*), dan rasionalisme (*burhani*). Dalam dunia Islam, kedua jenis epistemologi tadi bukanlah sesuatu yang ditampik. Keduanya digunakan. Namun, epistemologi Islam memiliki tambahan yakni epistemologi huduri atau “kebenaran yang hadir”. Kebenaran tidak lagi pada taraf menduga-duga

4 Clifford Geertz, *The Religion of Java* diterjemahkan menjadi *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, Illinois: Massachusetts Institute of Technology, 1960, diterbitkan ulang dalam versi terjemahan oleh Penerbit Komunitas Bmbu, februari 2013. Bagian pendahuluan, hlm. xxxi

atau dalam jaring kalkulatif. Kebenaran yang hadir adalah kebenaran yang bisa dirasakan, - kebenaran yang hakiki.

Salah satu filsuf barat paling penting, Emanuel Kant, dalam bukunya yang berjudul *Critique of Pure Reason* pernah mengatakan bahwa panca indra dan rasionalitas hanya bisa menangkap sesuatu yang disebut dengan “fenomena” dalam koridor 12 imperatif kategoris. Ada hal lain yang tidak bisa ditangkap oleh panca indra dan rasionalitas tersebut, Kant menyebutnya dengan nama “numena” atau *the thing in itself*.

Namun, epistemologi berbicara sebaliknya. Melalui epistemologi huduri itulah kebenaran yang “hadir” bisa direngkuh. Numena yang menurut Kant tadi tidak bisa diraih, dalam epistemologi *huduri* inilah numena bisa diraih dan direngkuh, - kebenaran bisa dihadirkan secara utuh.

Lalu, apa kaitan cara pandang epistemologi Islam tadi dengan temuan Geertz. Di sinilah letak menariknya. Melalui epistemologi huduri inilah kecenderungan cara pandang kelompok santri ditentukan. Epistemologi huduri yang derivasinya adalah ilmu tasawuf inilah cara pandang inklusif dilahirkan. Dengan menggunakan kacamata tasawuf ini, maka tuduhan Geertz bahwa kelompok santri merupakan kelompok puritan, eksklusif, dan kolot menjadi tidak relevan.

Selain itu, seperti telah disinggung sebelumnya, stratifikasi dan klasifikasi sosial merupakan salah satu konsep yang penting dibahas. Selain sebagai

salah satu pisau analisis, kelas sosial juga memainkan peran yang penting dalam melihat dinamika keagamaan dan akses terhadap pengetahuan. Baik itu pengetahuan agama, maupun pengetahuan non-agama.

Aspek pendidikan dan akses terhadap pengetahuan menjadi aspek yang penting dibahas mengingat hal ini merupakan salah satu indikator dari aspek yang membentuk pandangan dunia dan pandangan politik dalam rangka membangun sebuah identitas baru Indonesia pasca-kemerdekaan.

## **Agama Jawa dan Pengakuan Negara**

Menurut Parsudi Suparlan, Islam bukan agama Jawa. Penulis sepenuhnya setuju dengan pendapat tersebut. Bahwa Islam dianut oleh mayoritas orang Jawa, itu iya. Tapi, apakah Islam merupakan bagian dari agama Jawa, itu merupakan kesimpulan yang terburu-buru. Agama Jawa di sini adalah sebuah agama yang dilahirkan dan tumbuh berkembang setarik-senafas dengan kebudayaan jawa.

Memang, Islam sendiri sudah embodied dengan kebudayaan Jawa. Namun, hal tersebut bukan satu-satunya alasan yang bisa membenarkan bahwa Islam merupakan bagian dari agama Jawa. Ada banyak hal dalam kebudayaan Jawa yang kadang-kadang cocok dengan tradisi Islam, tapi kadang-kadang juga saling meniadakan. Hal-hal semacam ini yang kemudian menjadi dialektika yang terus-menerus terjadi dalam hubungan antara sesama pemeluk Islam sendiri.

Baru-baru ini, Lakpesdam PBNU bersama koalisi masyarakat sipil mengajukan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Adminduk No.14 Tahun 2013. Buntut dari dikabulkannya JR UU Adminduk adalah negara wajib mengakomodasi kelompok kepercayaan dan dicantumkan di dalam KTP. Namun, perdebatan berikutnya adalah soal keberatan MUI yang merasa bahwa agama dan kepercayaan bukan dua hal yang setara. Bagi MUI, agama itu jelas Tuhannya, sementara kepercayaan dianggap kabur. Sehingga, kolom agama dan kepercayaan perlu dipisah dan dibedakan. Lebih jauh lagi, diluar kewenangan MUI sendiri, negara perlu membuat KTP khusus bagi penganut kepercayaan.

Yang menarik perhatian saya adalah soal agama yang merasa "lebih mulia" ketimbang kepercayaan. Bahkan, Prof. Koentjaraningrat pernah membuat tulisan soal perbedaan agama dan religi. Namun, saya sendiri tidak sependapat dengan perbedaan tersebut. Ada beberapa alasan, diantaranya: *Pertama*, agama dalam bahasa inggris disebut dengan *religion*. Membuat perbedaan agama dan religi itu seperti menggarami lautan, -sebuah laku yang sia-sia belaka.

*Kedua*, agama sendiri memiliki konsep kepercayaan. Agama jelas tidak mungkin lepas dari kepercayaan. *Ketiga*, anggapan Agama itu "putihan" dan kepercayaan itu "abangan" merupakan sebutan *derogatif* dan merendahkan. Penyebutan abangan kepada kelompok kepercayaan menyimpan misi mesianistik yang menganggap bahwa abangan "belum beradab" atau "belum tercerahkan". Lebih tepatnya; belum beriman atau belum *ber-Islam*. *Keempat*, sebenarnya sebutan Tuhan, Allah adalah kata ganti ketiga. Ia bukan nama tuhan itu sendiri. Sebutan Allah sendiri adalah "*pronoun*" atau kata ganti. Sama seperti *Sang Hyang Widhi* yang juga *pronoun* atau kata ganti ketiga. Jika kita menilik kembali Victor Turner (1967) soal definisi agama, ia bilang bahwa agama adalah "*unfied system of beliefs and practices relative to sacred things*".

Dari beberapa bahan dan kesimpulan yang kita temui ini, nampaknya penggunaan istilah agama Jawa oleh Geertz masih perlu kita tinjau ulang dan kritisi. Selain karena persoalan emik dan etik, penggunaan istilah agama Jawa ini bukan tidak mungkin merupakan simplifikasi yang tidak melulu baik bagi diskursus keilmuan kita. []